

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan tidak saja menyangkut dimensi ekonomi tetapi juga menyangkut masalah dimensi sosial. Tenaga kerja menjadi salah satu aspek ekonomi yang membutuhkan pengawasan, pengendalian dan kebijakan untuk mengelola. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah maka akan menimbulkan masalah serius mengenai tenaga kerja. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang kompleks dan besar, karena memiliki pengaruh yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu dapat dipahami. Sehingga menjadikan masalah tersebut sebagai masalah yang besar karena berkaitan dengan pembangunan nasional yang ada di Indonesia (Andriyanto, 2020).

Pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap

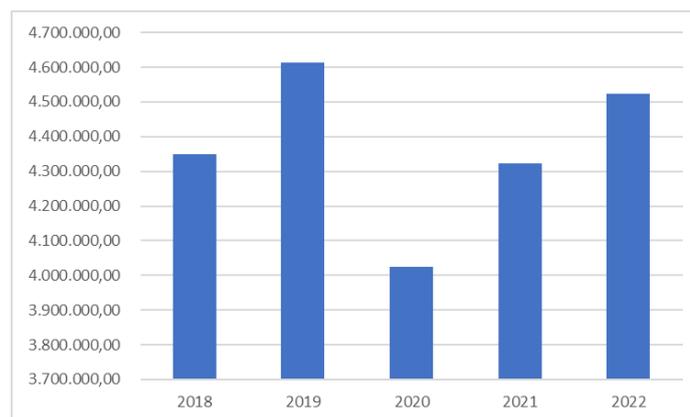
sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Ananda *et al.*, 2023).

Indonesia mempunyai jumlah sumber daya yang besar, dengan bersifat produktif dan efisiensi tentunya akan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan perekonomian suatu negara atau ekonomi suatu daerah (Nur Feriyanto, 2014), pertumbuhan suatu negara atau ekonomi suatu daerah yang dilihat dari produk domestik bruto (PDB) perkapita (untuk negara) serta produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita (untuk daerah) serta ditentukan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui keberhasilan negara atau daerah tersebut dalam melakukan peningkatan produktifitas serta pencapaian efisiensi kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada dan sekaligus memiliki potensi tenaga kerja yang besar. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun diiringi dengan pertumbuhan angkatan kerja (penduduk usia kerja yang mencari kerja). Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja di dalam pasar juga meningkat.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hampir 60% industri pengolahan berada di Jawa Barat, hal ini menandakan bahwa sektor industri merupakan salah satu kontributor ekonomi yang cukup signifikan di wilayah Jawa Barat. Dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, 40 diantaranya berlokasi di Jawa Barat (Qushoy *et al.*, 2022).

Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan masih mengalami fluktuatif. Masalah ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Sektor industri pengolahan ini diharapkan mampu menyerap tenaga

kerja di Provinsi Jawa Barat dan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya sektor industri pengolahan ini maka dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Adapun data tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1. 1 Perkembangan Tenaga Kerja (Jiwa)

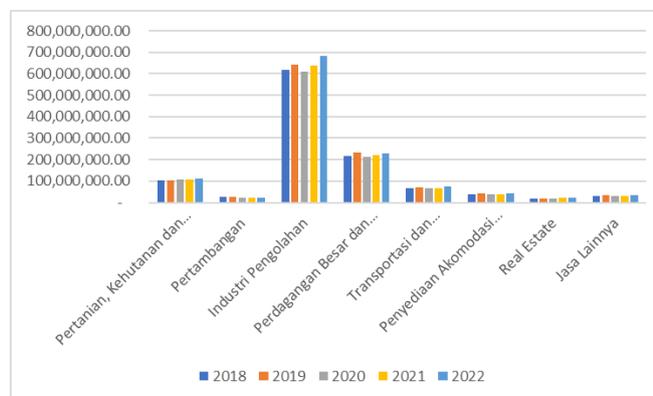
Sektor Industri Pengolahan Tahun 2018-2022 di Jawa Barat

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap dari tahun 2018-2022 di sektor industri pengolahan masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, sektor industri di Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 588.601 tenaga kerja yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Faktor utama meliputi pembatasan operasional akibat *lockdown*, penurunan permintaan global, gangguan rantai pasokan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai respon terhadap tekanan ekonomi.

Selain melihat tingkat penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga perlu melihat pergerakan perekonomian daerah di Indonesia. Untuk melihat tolak ukur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB daerah tersebut.

Dalam mengukur kinerja perekonomian suatu daerah, PDRB dianggap sebagai tolak ukur terbaik dimana PDRB merupakan nilai pasar paling akhir dari *output* produksi di suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

PDRB dapat mempengaruhi kesempatan kerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah *output* dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Apabila *output* meningkat maka akan mendorong penambahan permintaan tenaga kerja agar produksi di tingkatkan. Adapun perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berdasarkan lapangan usaha tahun 2018-2022 di Jawa Barat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1. 2 Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan (Juta Rupiah)

Sektor Industri Pengolahan Tahun 2018-2022 di Jawa Barat

Pada tahun 2022, industri pengolahan di Jawa Barat berhasil berkontribusi sebesar 42,24% pada perolehan PDRB, dimana dalam struktur perekonomian Jawa Barat menduduki peringkat pertama. Selain itu, sektor industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran (Rahma Hardinasari, 2021). Melihat kontribusi sektor industri pengolahan yang besar dalam PDRB Provinsi Jawa Barat, tidak lepas dari banyaknya kawasan industri yang berlokasi di beberapa kabupaten dan kota di

Jawa Barat, yang antara lain adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kota Depok, dan lain-lain. Tingginya kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Barat idealnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dikarenakan peningkatan PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan adanya peningkatan jumlah produksi dan penjualan. Sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk mengejar peningkatan penjualan. Namun, serapan tenaga kerja di kawasan industri pengolahan dapat dikatakan belum efisien, mengingat Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.

Kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar tenaga kerja, sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian. Padahal ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang penting dalam usaha memajukan perekonomian. Tenaga kerja yang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas menjadi hal yang pokok dalam pembangunan ekonomi, dimana tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

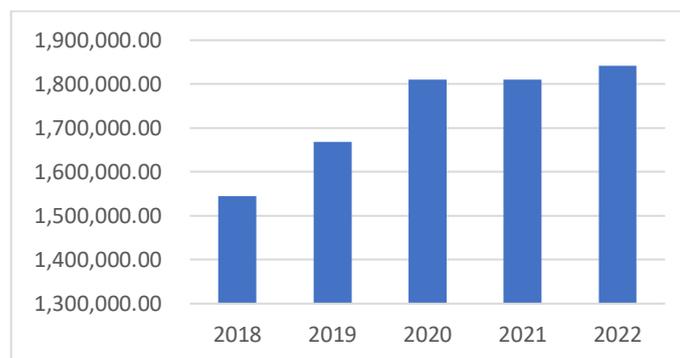
Tinjauan makro sektoral menggambarkan sebuah perekonomian yang dapat berstruktur agraris, industrial atau niaga tergantung pada sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan (Dumairy, 1996). Berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2022 (Gambar 1.1) Pangsa terbesar dalam PDRB adalah sektor

industri pengolahan, namun sektor industri pengolahan bukan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat. Berbeda dengan sektor industri, kontribusi sektor pertanian serta perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB yang lebih kecil justru menjadi pangsa tenaga kerja yang tinggi di Jawa Barat.

Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja didalam pasar bertambah. Namun disetiap peningkatan angkatan kerja tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan maupun jumlah yang diminta baik sektoral maupun keseluruhan menciptakan struktur upah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999, yang mengatur mengenai upah minimum, dan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001 memberikan wewenang kepada pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menetapkan upah minimumnya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh SMERU (2001) bahwa terdapat tanda-tanda awal pengalihan wewenang terkait pengupahan akan meningkatkan kenaikan upah minimum di beberapa daerah. Terdapat banyak studi mengenai upah minimum dan adanya kenaikan upah minimum justru menjadi topik yang penting serta efek tenaga kerja atau pengangguran terhadap upah minimum masih menjadi suatu masalah penting (Villeneuve & Brown, 1982).

Berdasarkan data BPS (2022) upah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2022 di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2018 Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp.1.544.36. Lalu mengalami

peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp. 1.668.373. Pada tahun 2020 dan 2021 UMP di Jawa Barat naik senilai Rp. 1.810.351. Kemudian di tahun 2022 UMP di Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi sebesar Rp. 1.841.487. Berikut merupakan perkembangan UMP Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 pada gambar 1.3 di bawah ini:



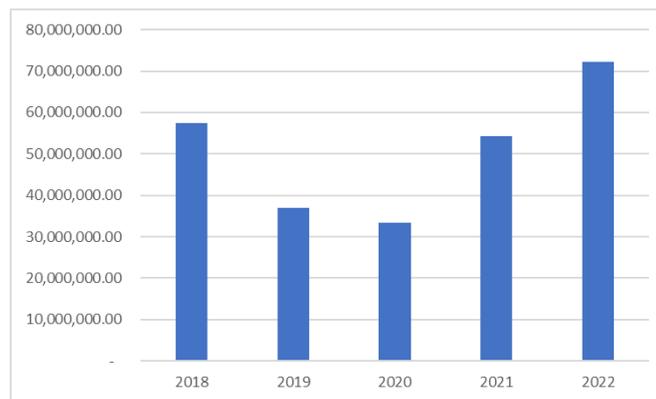
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

**Gambar 1.3 Perkembangan UMP (Rupiah)
Tahun 2018-2022 di Jawa Barat**

Data tersebut menjelaskan bahwa UMP di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Kenaikan UMP merupakan hasil dari penetapan pemerintah berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Meningkatnya upah tersebut diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah indikator investasi atau stok modal yang dimiliki oleh suatu daerah. Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Menajang, 2019). Maraknya investasi di suatu negara,

tentunya akan membawa beberapa manfaat yang positif bagi negara yang bersangkutan. Misalnya, terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat. Berikut merupakan perkembangan investasi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 pada gambar 1.4 di bawah ini:



Sumber: *Open Data Jabar*

Gambar 1. 4 Perkembangan Investasi (Juta Rupiah)

Sektor Industri Pengolahan Tahun 2018-2022 di Jawa Barat

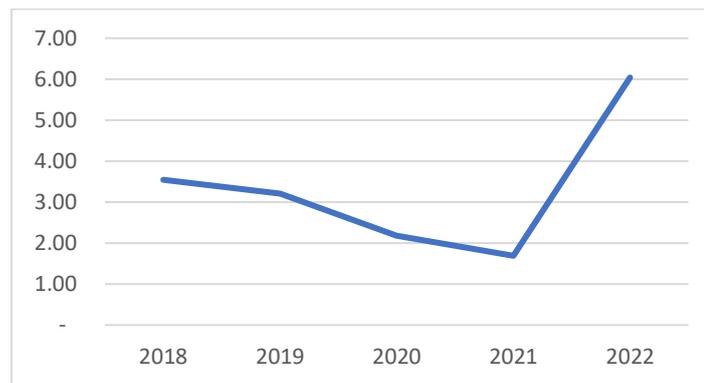
Berdasarkan data yang diperoleh dari *Open Data Jabar* bahwa jumlah investasi selama 5 tahun pada sektor industri pengolahan di Jawa Barat mengalami fluktuatif. Investasi terendah diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp.33.444.918 juta. Hal tersebut disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi daerah. Sedangkan, pada tahun 2022, investasi di sektor industri pengolahan meningkat karena kembalinya ekonomi dan perkembangan sektor industri pengolahan sebesar Rp.72.204.972 juta. Kondisi yang tidak stabil seperti ini dapat terjadi karena terdapat kendala pada sektor pengolahan, adanya investasi yang baru masuk dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga investasi menjadi salah satu faktor yang bisa berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di suatu daerah.

Apabila suatu perusahaan mendapatkan investasi yang tinggi dari dalam maupun luar negeri maka penyerapan tenaga kerja akan lebih besar sehingga akan menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang- Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan nasional Republik Indonesia, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memotivasi masyarakatnya untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya masing-masing sehingga akan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, dengan harapan meningkatnya investasi akan berdampak pada munculnya perusahaan-perusahaan baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap banyak faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Berdasarkan hal tersebut bisa terjadi penambahan output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Shofar, 2020).

Selain itu, inflasi juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan berpengaruhnya terhadap tingginya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan gambar grafik 1.5, inflasi pada sektor industri pengolahan tahun 2018-2022 di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Berikut merupakan perkembangan inflasi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 pada gambar 1.5 di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (diolah)

**Gambar 1. 5 Perkembangan Inflasi (Persen)
Tahun 2018-2022 di Jawa Barat**

Berdasarkan data inflasi yang diperoleh dari badan pusat statistik pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya beli masyarakat. Namun, inflasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang tinggi tetapi tergolong ringan karena beberapa faktor seperti gangguan pemulihan COVID-19 yang menyebabkan gangguan suplai dan harga tidak stabil, kenaikan harga komoditas global, kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta adanya kelangkaan minyak goreng.

Menurut (Indradewa & Natha, 2015) apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan perusahaan seharusnya berusaha akan menambah jumlah *output* atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah *output* tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat maka perusahaan akan mengurangi jumlah *output* akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 tidak stabil dan terlihat dari jumlah pertumbuhannya dapat disebabkan oleh berbagai pengaruh seperti, PDRB sektor industri pengolahan yang mengalami fluktuasi karena tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, upah, investasi sektor industri pengolahan yang perkembangannya mengalami fluktuasi pada tahun 2020 akibat COVID-19, dan inflasi yang meningkat sangat tinggi pada tahun 2022 menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini **“Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, UMP, Investasi sektor industri pengolahan dan Inflasi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat tahun 2007-2022?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, UMP, Investasi sektor industri pengolahan dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat tahun 2007-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, UMP, Investasi sektor industri pengolahan, dan Inflasi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat tahun 2007-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, UMP, Investasi sektor industri pengolahan, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat tahun 2007-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat seperti PDRB sektor industri pengolahan, UMP, Investasi sektor industri pengolahan, dan Inflasi. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis determinan penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini semoga menambah ilmu bagi pembaca dan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

2. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk melengkapi studi mengenai analisis determinan penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan bisa membantu pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, setelah mengetahui analisis determinan penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan di

